



E-Book
Kuanta #2B

PENDIDIKAN ALA MBAH GOOGLE VS GURU **PART 2**

Pendidikan Ala Mbah Google VS Guru

Part 2

Pimpinan Redaksi : M. Fauzi, N. F.
Editor : Yuni Istikhah
Penulis : Shobikhul Qisom
Desain Tata Letak : Esti Anugraheni M.

Diterbitkan : 2022

Penerbit:

Kuanta
Future Education Partner

Kuanta Indonesia

Jalan Gayungsari IV No 33 Surabaya
Telp. 0821-4125-4765
partnership@kuanta.id
www.kuanta.id

Copyright © Kuanta Indonesia, 2023

Kebijakan



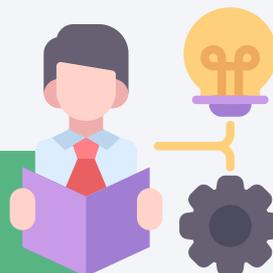
Pendidikan

Meilina (2016) memaparkan pengertian dari Okorama (2000:190) terkait kebijakan pendidikan. Educational policies are initiatives mostly by governments that determine the direction of an educational system (Kebijakan pendidikan merupakan inisiatif pemerintah dalam menentukan arah dari sistem pendidikan). Melalui pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa perkembangan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Melalui kebijakan pendidikan ini diharapkan adanya peran yang efektif dalam memajukan pendidikan di berbagai wilayah.

Namun faktanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kebijakan pendidikan ini. Poin-poin penting yang harusnya disadari adanya kekurangan di dalam kebijakan tersebut sehingga perlu perbaikan. Dirilis dari buku Sama (2016), ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan pendidikan, yakni: **1) Desentralisasi Pendidikan, 2) Pasal Penting, 3) Pentingnya Pemerataan Guru, 4) Persoalan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal, 5) Perihal Dana BOS, 6) Persentase Drop Out, 7) Ironi Pengangguran Lulusan SMK, 8) Memperkuat Kebijakan Pendidikan Karakter**



Desentralisasi



Pendidikan

Evi Siregar (kompasiana.com) memaparkan istilah desentralisasi sebagai sebuah penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam paparan Samani (2016:51), **sosialisasi desentralisasi pendidikan tidaklah merata sehingga menyebabkan adanya pendapat yang berbeda terkait desentralisasi pendidikan, baik dari pemegang kebijakan ataupun pelaksana kebijakan.** Hal ini dapat menjadi sebuah sirine peringatan atas kemungkinan tidak efektif berjalannya pendidikan akibat perbedaan pemahaman yang kurang benar di antara pengambil kebijakan ataupun pelaksana kebijakan.

Samani (2016:57) menyatakan bahwa banyak ahli pendidikan yang kaget terhadap sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia. Karena biasanya desentralisasi diletakkan di tingkat negara bagian atau setingkat provinsi, tapi di Indonesia, desentralisasi diletakkan di kabupaten/kota. Sebenarnya masalah yang paling mendasar dari kebijakan desentralisasi pendidikan ini adalah ketidakjelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Kalau kita cermati isi PP 25/2000, sebenarnya tugas dan kewenangan pemerintah pusat “hanya menetapkan standar”, kewenangan provinsi “membantu pemerintah pusat”, sedangkan pelaksanaan urusan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Namun beberapa kasus yang terjadi menguatkan dugaan saya atas kurang jelasnya pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Deskripsi yang dimuat dalam PP 25/2000 tampaknya belum jelas bagi ketiga level pemerintahan kita. Contohnya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah mengadakan pelatihan guru yang isinya sama. (Samani, 2016: 58—59)

Ketidakjelasan pembagian tugas ini tentu sangat berdampak terhadap jalannya pendidikan. Barangkali adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah menyebabkan pemerintah pusat masih mengurus tugas yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Pun kurangnya pengalaman pemerintah daerah dalam memangku tugas besar menjadi faktor atas kurangnya kepercayaan dari pemerintah pusat.



Namun jika terus seperti ini, maka sistem desentralisasi pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif. Cara mengatasi permasalahan ini tentunya dengan penegasan terhadap tugas dan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Samani (2016:59—60) memaparkan sebuah solusi terkait ketidakjelasan tersebut, yakni:

Terkait dengan hal di atas, sebaiknya pembagian tugas dalam pembinaan persekolahan dibagi dalam jenjang. Pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi tugas dan kewenangan kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA dan SMK) menjadi tugas dan kewenangan provinsi. Sedangkan perguruan tinggi menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat masih punya tugas menentukan kebijakan umum, standar, mengembangkan inovasi, dan melakukan pemantauan.



Pasal Penting



Guru merupakan komponen penting yang mampu memajukan kualitas pendidikan. Meskipun pemerintah yang mengatur kebijakan, namun **kunci keberhasilan ada pada guru sebagai pelaksana kebijakan.** Itu sebabnya perlu adanya pemenuhan kebutuhan guru untuk mendorong kualitas guru menjadi lebih baik. Hal ini telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD):

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal yang menjamin kebutuhan guru ini akan sangat berdampak baik jika terealisasi dengan maksimal. Sebab banyak penelitian menyebutkan bahwa kesuksesan pendidikan 50% tergantung dari gurunya.

Studi John Hattie (2008) di New Zeland menyimpulkan 58% hasil belajar siswa tergantung pada gurunya. Studi serupa di Amerika menunjukkan pengaruh tersebut sebesar 53% (Mourshed and Barber, 2010), sedangkan di Indonesia pengaruh itu sebesar 54,5% (Pujiastuti, Widodo, dan Raharjo,2012) (Samani, 2016:64)

Jika guru memiliki kualitas yang bagus, maka dapat disimpulkan bahwa siswa juga akan mendapat hasil belajar yang bagus. Begitupula sebaliknya, jika guru di sekolah tidak memiliki mutu yang bagus, maka hasil belajar siswa juga tidak akan bagus. Peran guru yang sangat mempengaruhi kualitas belajar siswa ini perlu selalu diingat agar kebutuhan guru selalu terpenuhi.



Pentingnya



Pemerataan Guru

Ada banyak mahasiswa yang lulus dengan gelar sarjana pendidikan di tiap tahunnya, namun masih saja Indonesia kekurangan guru di daerah-daerah terpencil. Fakta mengungkapkan bahwa masih banyak desa-desa pelosok yang kekurangan guru. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius karena ada banyak anak-anak Indonesia yang harus diberi ilmu di desa-desa pelosok sana.

Pembentukan Komite Reformasi Tata Kelola Guru sangat tepat untuk mencari solusi yang komprehensi dengan memerhatikan beberapa hal berikut: **1) Komite tersebut harus bekerja ekstra keras dan berkoordinasi dengan berbagai instansi; 2) Pemikiran kita harus jernih terhadap guru yang sudah ada di lapangan harus jernih; 3) Mempertimbangkan amanat pasal 23 ayat (1) UUGD untuk dapat mengirimkan guru ke sekolah di pelosok;**

4) Perlu dikembangkan pola pembinaan karier guru yang komprehensif; dan 5) Continuous professional development (CPD) perlu dicarikan bentuk yang luwes dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). (Samani, 2016: 69-70)

Samani (2016:71) juga memaparkan pendapat dari Wakil Presiden Boediono (pada masanya) yang mengakui bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal (Kompas 16/11/2013). Menurut beliau ada tiga tantangan mendasar untuk mengejar ketertinggalan. Pertama, Indonesia kekurangan guru bermutu sedangkan guru bermutu yang ada tidak terdistribusi dengan baik. Kedua, fasilitas pendidikan sangat kurang khususnya di daerah yang jauh dari kota. Ketiga, isi dan penyampaian materi ajar tidak sesuai dengan standar.

Memang benar adanya bahwa pemerataan guru merupakan perihal yang sangat rumit. Keengganan guru mengajar di desa terpencil sebab kurangnya fasilitas yang ada sangat mempengaruhi penyebaran guru di Indonesia.

Salah satu penelitian oleh Friedman (2013) yang juga dipaparkan dalam Samani (2016:78) dapat menjadi contoh bagi Indonesia terkait peningkatan mutu pendidikan yang disebabkan oleh: **(1) komitmen yang tinggi terhadap pendidikan calon guru, (2) pengembangan profesional bagi guru dengan menekankan peer to peer learning, (3) pelibatan orang tua dalam pembelajaran anak, (4) adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mendorong pencapaian standar pendidikan yang tinggi, dan (5) adanya budaya untuk menghargai guru dan inovasi pendidikan yang dilakukan.** Penelitian yang lebih awal lagi dilakukan oleh Abu Duhou (1999) bahwa peningkatan mutu pendidikan dihasilkan oleh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru.



Namun guru baru dapat melaksanakan inovasi, jika **(1) memiliki kompetensi yang bagus, (2) memiliki otonomi dalam melakukan inovasi, (3) iklim kerja yang mendorong guru melakukan inovasi.**

Semua poin tersebut merupakan poin-poin penting yang harusnya juga diperhatikan oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan pendidikan di Indonesia.



Persoalan Pendidikan



Formal, Nonformal, Informal

Pendidikan anak tidak hanya bisa didapat melalui pendidikan formal, melainkan juga melalui sekolah informal dan nonformal. Ketiga jalur ini bisa saling memperkaya dan melengkapi.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang biasa dilalui di sekolah-sekolah negeri atau swasta. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang melalui jalur kursus atau bimbingan belajar. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang dilalui melalui keluarga atau kegiatan belajar mandiri secara sadar dan bertanggung jawab, contohnya seperti homeschooling.

Ketiga jalur ini bisa saling melengkapi karena tiap anak bisa dapat ilmu dari luar sekolah. Namun meski begitu, sekolah tetap penting kehadirannya karena ia merupakan tempat untuk memperoleh pendidikan secara utuh.



Perihal Dana BOS



Biaya Operasional Sekolah harus diberikan pada sasaran yang tepat guna mendukung biaya operasional sekolah yang masih kekurangan dana dalam jalannya pendidikan di sekolahnya. Jika BOS jatuh pada sekolah yang didominasi oleh banyak masyarakat kecil, itu akan sangat efektif karena spp yang diterima juga relatif kecil. Maka BOS akan sangat membantu biaya operasional sekolah.

Pendidikan di Indonesia wajib merata baik untuk kalangan orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Seluruh lini masyarakat wajib mendapat pendidikan. Maka BOS disini menjadi salah satu satu untuk membantu biaya operasional sekolah sehingga tidak membebani pada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

Education

Presentase Drop Out



Presentase DO ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Berikut data DO yang dipaparkan dalam buku Samani (2016): **Dari 100% anak Indonesia yang masuk ke SD, ternyata hanya 94,1% yang tamat. Jadi ada 6% yang drop out (DO). Dari grafik tampak bahwa DO mulai signifikan pada kelas 4. Artinya mulai kelas 4 SD anak mulai rawan DO. Perlu dicari penjelasan mengapa begitu, karena sampai kelas 3 DO sangat kecil. Dari 94% anak yang lulus SD itu hanya 72,4% yang melanjutkan ke SMP. Jadi ada 21,7% anak yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP. Dari 72,4% yang masuk ke SMP hanya 71,2% yang lulus SMP. Berarti ada 1,2% yang DO. Dari 71,2% anak lulus SMP hanya 49% yang masuk SLTA. Jadi ada 22,2% yang tidak melanjutkan ke SLTA. Dari 49% anak yang masuk SLTA hanya 46% yang lulus. Jadi ada 3% yang DO.**

Banyaknya persentase DO ini perlu diperhatikan. Minimnya anak yang masuk SLTA setelah lulus SMA bisa jadi disebabkan karena masa wajib belajar sudah habis sehingga perlu membayar ketika SLTA.



Ironi Pengangguran



Lulusan SMK

Data terbaru tentang tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 berjumlah 7,05 juta orang. **Tingkat Pengangguran (TPT) yang paling mendominasi adalah pada lulusan SMK sejumlah 10,425. Sedangkan peringkat kedua diduduki oleh SMA sebesar 7,92%.** (kompas.com)

Tingginya TPT pada lulusan SMK ini patut dipertanyakan karena pemerintah mendirikan SMK agar mempercepat lulusannya untuk siap bekerja. Namun data tersebut bukan berarti menggambarkan bahwa SMK kalah saing dengan SMA dalam ranah pekerjaan, karena bagaimanapun SMK lebih dibekali keterampilan atas banyak hal sehingga dapat menjadi sdm yang lebih siap bekerja. Barangkali ada faktor lain yang menyebabkan TPT SMK lebih besar, seperti kurangnya fasilitas untuk mendukung keterampilan mereka. Ketika SMK semakin diperbanyak, pemerintah juga harus menggalakkan pemenuhan fasilitas praktik siswa SMK beserta pemenuhan guru dengan kualitas yang baik sehingga dapat menghasilkan siswa SMK yang bagus keterampilannya dan mudah diserap dalam lapangan pekerjaan.



Memperkuat Kebijakan



Pendidikan Karakter

Karakter menjadi hal yang sangat penting bagi siswa dalam menjalani proses pendidikan. Tentunya karakter yang baik dapat disemai dari adanya pembiasaan dalam bersikap baik, diikuti dengan pembudayaan, serta teladan dalam mencontohkan perilaku baik. Peran guru sebagai contoh bagi siswa juga sangat penting untuk terus menerapkan karakter baik dalam setiap pembelajaran.

Sumber:

Ardela, Fransiska. (2019). Apa Bedanya Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Pendidikan Informal?. [online].
www.finansialku.com

Samani, Muchlas. 2016. Semua Dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?. Surabaya: Unesa University Press

Ulya, Fika Nurul. (2019). BPS: Pengangguran Meningkat, Lulusan SMK Mendominasi. [online]. www.kompas.com



Shobikhul Qisom
Professional Coach Kuanta



Kuantana Indonesia

Jl. Gayungsari IV No. 33 Surabaya

  kuantaindonesia

 Kuantana Indonesia

 partnership@kuanta.id

 www.kuanta.id

 0821-4125-4765

Scan Our Profile



Scan Our Catalog

